

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN DALAM PEMBELAJARAN DALAM PERSPEKTIF SEKOLAH ADIWIYATA

Oleh : SUDJOKO, M.S.

PRAWACANA

Tempora mutantur et nos mutamur in illis adalah sebuah ungkapan dalam bahasa latin yang artinya jaman terus berubah dan kita akan selalu bersamanya. Jika ungkapan tersebut dikaitkan dengan Pendidikan Lingkungan Hidup (KLH), perubahan itu terjadi pada komponen-komponen dalam pendidikan dan pembelajaran. Perubahan akan terjadi semakin nyata ketika kita harus memasuki era globalisasi.

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, perubahan akan selalu terjadi pada komponen *raw input*, yaitu siswa yang karakternya akan berbeda pada setiap tahun angkatan. Komponen *instrument input* yang berupa kurikulum, dalam jangka tertentu (lima tahunan) akan berganti dan sarana lain akan mengalami perkembangan. Sementara itu *environmental input*, yang berupa lingkungan fisik dan sosio-kultural di masyarakat *tempat* pendidikan berlangsung akan terus mengalami dinamika. Namun pada semua komponen dalam sistem pendidikan yang mengalami perubahan itu akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan *output* yang tetap tidak berubah (meskipun juga dinamis) yaitu manusia seutuhnya.

Apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Tulisan dalam wacana ini mencoba untuk mencari jawab terhadap pertanyaan tersebut dengan melalui analisis persoalan.

GAMBARAN ARUS GLOBALISASI DAN SITUASI-KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA

Sebenarnya permasalahan lingkungan hidup di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan utama lingkungan hidup global, yaitu (Ade Fadli, 2005) :

1. Degradasi lahan.
2. Jumlah kebutuhan air bersih dan pencemaran air.
3. Kerusakan sumber-sumber air : air laut dan air tawar.

4. Berkurangnya biodiversitas terrestrial (habitat kehidupan liar).
5. Pembabatan hutan
6. Pencemaran oleh perkotaan.
7. Perubahan cuaca

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan kegiatan (PLH) juga sangat beragam. Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam *Indonesian Summit on Sustainable Development* (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah ditetapkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (<http://www.uncsd2012.org/content/documents/358Submission%20Indonesia%20for%20Rio20.pdf>).

Meninjau situasi dan kondisi lingkungan di negeri kita, Wiratno dkk (2001 : 263) dalam bukunya “Berkaca di Cermin Retak” menulis : Fakta menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya dapat sepenuhnya mengemban mandat publik dalam mengelola sumberdaya secara bertanggungjawab. Kehancuran jutaan hektar hutan tropis dataran rendah di Sumatera sebagian di Kalimantan, perdagangan satwa liar yang tidak pernah bisa dikendalikan, rendahnya kesadaran sektor pembangunan lain dalam mendukung pembangunan kehutanan dan konservasi, adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Sebagai akibatnya, bencana alam, tanah longsor, erosi tanah, kekeringan, kebakaran hutan, pendangkalan danau dan waduk, terjadi di sebagian besar Sumatera, Kalimantan , dan di Jawa.

Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar adalah :

1. Pilar Ekonomi: menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pola konsumsi dan produksi, Teknologi bersih, Pendanaan/pembiayaan, Kemitraan usaha, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Industri, dan Perdagangan

2. Pilar Sosial: menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Kearifan/budaya lokal, Masyarakat pedesaan, Masyarakat perkotaan, Masyarakat terasing/terpencil, Pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan Hukum dan pengawasan
3. Pilar Lingkungan: menekankan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pengelolaan sumberdaya air, Pengelolaan sumberdaya lahan, Pengelolaan sumberdaya udara, Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, Energi dan sumberdaya mineral, Konservasi satwa/tumbuhan langka, Keanekaragaman hayati, dan Penataan ruang

Mitos yang hidup selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Anggapan atau jalan pikiran tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. John Naisbitt (1988) dalam bukunya yang berjudul *Global Paradox* memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini dimaksudkan kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia
- Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
- Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization* (WTO).
- Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang *fashion*, literatur, dan makanan.
- Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Penggambaran tentang keadaan lingkungan di negara kita, oleh Wiratno, dkk dinyatakan bahwa : Laksana kita berkaca, maka “cermin” yang bernama Indonesia ini telah retak, tercabik-cabik dalam beberapa bagian, bahkan ada beberapa yang telah “hilang” tak terjangkau oleh otoritas kita sebagai pemangku hak sekaligus kewajiban terhadap akses pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh merebaknya euforia otonomi daerah. Pada satu sisi muncul harapan akan kelahiran demokratisasi yang sehat dan wajar. Namun di sisi lain muncul juga wajahnya yang garang, yang cenderung mengarah kepada keserakahan. Di beberapa daerah sudah mulai muncul para pendompleng (*free reader*) dan petualang politik yang mengatasnamakan “demi kepentingan pendapatan asli

daerah (PAD)”, mereka meminta hak untuk mengelola kawasan hutan di wilayahnya, termasuk di dalamnya kawasan konservasi. Intisari di balik niat baik itu memang ternyata demi kepentingan jangka pendek kelompok tertentu (Wiratno, dkk : 264).

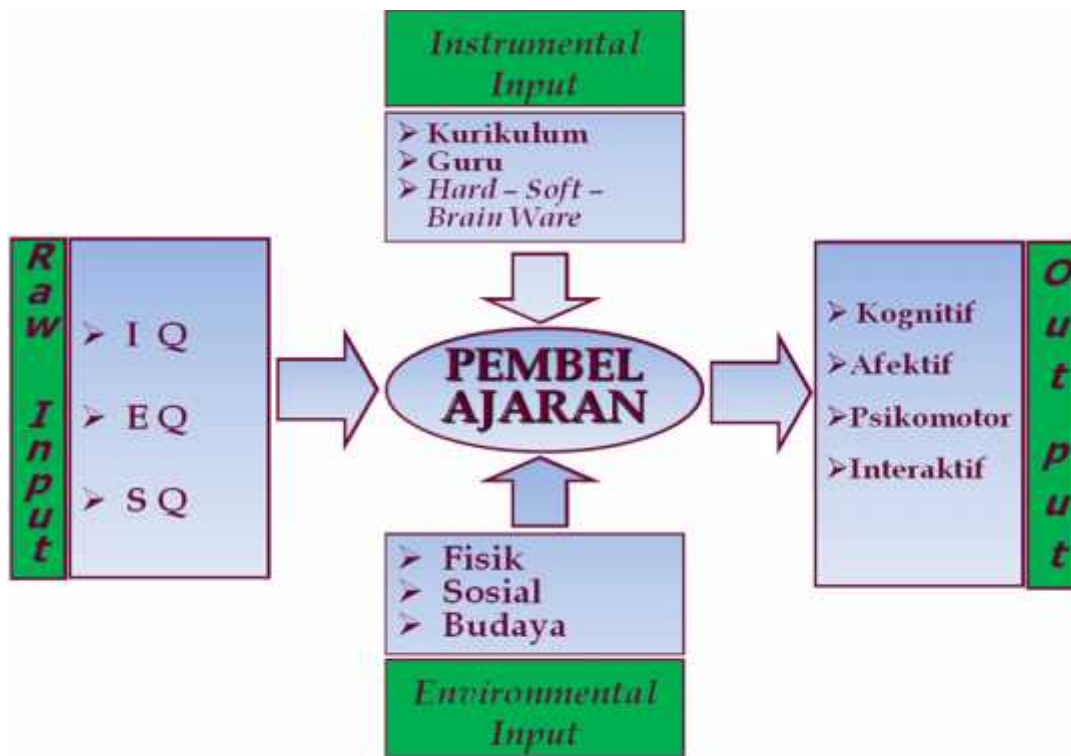
Dari paragraf di atas, tampaklah bahwa setiap orang yang hidup di suatu negeri adalah pelaku lingkungan dan juga sebagai pemangku kepentingan (*stake holder*) lingkungan hidup. Oleh sebab itu PLH adalah wajib bagi setiap orang. Maka, kurikulum sekolah harus mampu mewadahi dan mengembangkan PLH, sebagaimana peran lembaga pendidikan yang harus mampu berfungsi sekaligus responsif dan direktif bagi masyarakat.

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

PLH sudah sejak lama menjadi bagian pokok di dalam pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, meskipun dilaksanakan secara integrated di dalam kurikulum sekolah. Sejarah PLH diawali dengan prakarsa Pengembangan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap PLH. Hingga tahun 2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL, perorangan dan lembaga) yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Sedangkan tahun 1998 – 2000 Proyek *Swiss Contact* berpusat di VEDC (*Vocational Education Development Center*) Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup Kejuruan dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.

Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program PLH pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup (Anonim, 2011) .

Proses pembelajaran, secara umum, digambarkan pada skema sbb :



Gambar 1. Komponen dalam Proses Pembelajaran (Sudjoko, 2006)

TANTANGAN KINI DAN MASA DEPAN

Dalam pelaksanaan PLH di Indonesia sebenarnya instrumen-instrumen (lihat bagan 1 tentang komponen pembelajaran !) yang mendasari implementasinya sudah tersedia, namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika instrumen itu diimplementasikan oleh pendidik/guru. Dalam kondisi dan situasi yang ada pada masa kini, pembelajaran dituntut mampu menghasilkan *output* yaitu pembelajar yang mampu hidup di masa depan.

Pada arus era globalisasi, suatu bangsa akan mampu bertahan hidup (eksis) apabila mampu berkarya yang memiliki daya-beda dan daya-saing dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Hal-hal inilah yang akan menimbulkan tantangan baik masa kini maupun masa depan.

Instrumen Input untuk PLH

1. Sarana yang tergolong dalam Instrumental Input untuk PLH, yang berupa kurikulum sekolah dan Perguruan Tinggi (khususnya jenjang S-1) dan program-program lain cukup tersedia. Di tingkat Dikdasmen PLH sudah tersosialisasikan dalam bentuk integrasi pada minimal 9 buah matapelajaran. Khusus untuk matapelajaran Sains disebutkan pula bahwa pendekatan isi materi Sains menggunakan pendekatan Salingtemas (Sains – Lingkungan – Teknologi – Masyarakat). Di tingkat PT, PLH pada umumnya dilaksanakan secara monolitik dalam bentuk matakuliah PLH, KLH, atau PKLH.
2. Teori-teori pendidikan dan pembelajaran, yang harus dikuasai oleh guru dan dosen, sudah cukup beranekaragam, dan telah dikembangkan menjadi model-model pembelajaran yang meliputi model pembelajaran sosial, model pembelajaran mengolah informasi, model pembelajaran individu, dan model pembelajaran mengubah perilaku.
3. Program yang berkaitan dengan penambahan kurikulum yang bersifat peningkatan *outcomes* lulusan untuk Dikdasmen adalah program sekolah Sekolah Adiwiyata. Dengan melaksanakan program Adiwiyata (Anonim, 2011) akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah.
4. Sarana untuk pembelajaran PLH, terutama sebagai sumber belajar, berupa permasalahan lingkungan, baik fisik maupun sosial, merupakan kasus-kasus yang saat ini selalu dapat ditemukan di Indonesia. Kasus tentang degradasi lingkungan dan kerawanan sosial banyak terjadi, namun sementara itu upaya untuk mengatasinya juga sudah dilakukan dan dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk model upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.
5. Guru matapelajaran yang mengintegrasikan PLH sudah memiliki kualifikasi yang memadai, karena sudah semakin banyak guru yang berlatar pendidikan minimal S-1 dan sudah bersertifikasi guru profesional. Sementara itu LPTK juga sudah meningkatkan diri dengan kualifikasi dosen dengan semakin banyaknya dosen lulusan S-3 dan dosen yang bersertifikasi profesional.

6. Kepemilikan sarana *hard wares dan soft wares* oleh lembaga pendidikan merupakan kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk pembelajaran PLH di sekolah.

Tantangan yang Harus Dihadapi

1. Degradasi lingkungan sampai sekarang masih terus terjadi, dan diperkirakan untuk satu dasawarsa ke depan masih akan tetap berlangsung, apabila tidak dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar pada kebijakan (peraturan) dengan disertai dengan kesungguhan dalam implementasinya. Sebagai contoh : (1) kebakaran hutan masih terjadi dan selalu berulang setiap tahun, (2) pembabatan hutan, (3) krisis air bersih dan kelangkaan sumberdaya alam lainnya, (4) angka kemiskinan yang masih tinggi, (5) konflik-konflik sosial, yang bahkan juga sudah merambah di dunia pendidikan, dan sebagainya.
2. Meskipun program sekolah Adiwiyata yang dimulai sejak tahun 2006 sampai 2011, namun pada kenyataannya, yang ikut partisipasi dalam program Adiwiyata baru mencapai 1.351 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia, diantaranya yang mendapat Adiwiyata mandiri : 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata 103 sekolah, atau total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia. Dari keadaan tersebut di atas, sebarannya sebagian besar di pulau Jawa, Bali dan ibu kota propinsi lainnya, jumlah/ kuantitas masih sedikit, hal ini dikarenakan Adiwiyata yang ada saat ini masih sulit diimplementasikan.
3. Kita telah melupakan konsep-konsep pendidikan yang merupakan hasil karya putera terbaik bangsa kita sendiri, tetapi lebih bangga jika dapat menyatakan konsep-konsep yang berasal dari bangsa asing, khususnya bangsa barat. Konsep “Tri Pusat Pendidikan” gagasan Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan adalah ditentukan atas tiga lingkungan yang saling berintegrasi, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sudah hampir dilupakan. Yang umum terjadi sekarang bahwa lingkungan keluarga mulai diabaikan karena mempercayakan pada pendidikan di sekolah, sementara itu lingkungan masyarakat semakin hilang kesadaran bahwa perilaku mereka akan memberikan pengaruh pada individu anak. Yang umum terjadi sekarang bahwa pendidikan di lingkungan keluarga

mulai diabaikan karena mempercayakan pada pendidikan di sekolah, sementara itu lingkungan masyarakat semakin hilang kesadaran bahwa perilaku mereka akan memberikan pengaruh pada individu anak.

UPAYA PEMECAHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

1. Konsep pendidikan Tri Pusat Pendidikan hasil gagasan Ki Hajar Dewantara perlu kembali kita pahami dan senantiasa kita pegang teguh.
2. Ketika guru menjadi *frontliner*, karena siswa telah diserahkan penuh oleh keluarganya kepada sekolah, guru harus mampu menerapkan prinsip pembelajaran “TRI NGA” KHD : *Ngerti – Ngrasa – Nglakoni*. Pendidikan adalah segala daya-upaya memajukan budi-pekerti anak, pikiran, dan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh KHD diingatkan bahwa terhadap segala ajaran hidup, cita-cita hidup yang kita anut, diperlukan pengertian (*ngerti*), kesadaran (*ngrasa*), dan kesungguhan dalam pelaksanaannya (*nglakoni*). Tahu dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak menyadari atau merasakan, serta kalau tidak melaksanakan atau memperjuangkan. “*Ngelmu tanpa laku kothong*” (ilmu tanpa perbuatan - kosong), “*laku tanpa ngelmu cupet*” (perbuatan tanpa ilmu – dangkal/kerdil). Implementasi konsep KHD ini tentu saja harus dipadukan dengan konsep pendidikan yang lain dan dijabarkan dalam model-model pembelajaran yang sesuai.
3. Guru di sekolah dan dosen di LPTK senantiasa menjaga profesionalisme dalam tugas mendidik. Ciri profesional adalah : (1) *expertise* (ahli di bidangnya), (2) *responsibilities* (berani bertanggung-gugat), dan (3) *corporateness* (kesejawatan dengan teman seprofesi).

PASCAWACANA

Tempora mutantur et nos mutamur in illis, sebagaimana yang diungkapkan dalam prawacana, adalah keniscayaan yang harus kita hayati dalam profesi sebagai pendidik. Namun dalam penghayatan itu sering terjadi kendala, dan bahkan kendala itu juga kadang-kadang menjadi keniscayaan yang klasik. Bukankah sosok guru adalah : Hasil pendidikan masa lalu –

Bekerja pada masa kini – namun untuk kepentingan anak didik di masa depan, yang tiga masa tersebut merupakan perbedaan? Namun, kendala itu sejatinya akan pupus apabila pendidik selalu menghidup-hidupkan prinsip profesionalisme sampai titik akhir ketika tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya mendidik bangsa ini.

SUMBER ACUAN

Ade Fadli. 2005. *Pendidikan Lingkungan Hidup: Bukan untuk pembebanan baru bagi siswa*. <http://timpakul.web.id/plh-4.html> (diakses tanggal 20 September 2012).

Anonim, 2011. *Panduan Adiwiyata : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan*. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

<http://www.uncsd2012.org/content/documents/358Submission%20Indonesia%20for%20Rio20.pdf>. (diakses tgl 5 Oktober 2012).

Ki Hajar Dewantara, 2009. *Menuju Manusia Merdeka*, Leutika, Yogyakarta.

Naisbitt, John, 1988. *Global Paradox*. Amazon com Seattle, Washington

Sudjoko dan Siti Mariyam, 2010. *Strategi dan Model Pembelajaran Biologi (Modul PPG)*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiratno, dkk, 2001. *Berkaca di Cermin Retak : Refleksi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. FOReST Press- The Gibbon Foundation Indonesia – PILI NGO Movement, Jakarta.